

LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN JUNI 2016

Pendahuluan

Fungsi pokok Komnas HAM yang dikenal rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **870 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	6	20	Kalimantan Barat	16
2	Sumatera Utara	76	21	Kalimantan Selatan	4

3	Bengkulu	4	22	Kalimantan Tengah	6
4	Jambi	8	23	Kalimantan Timur	15
5	Riau	26	24	Kalimantan Utara	0
6	Sumatera Barat	51	25	Gorontalo	3
7	Sumatera Selatan	24	26	Sulawesi Selatan	18
8	Lampung	9	27	Sulawesi Tenggara	12
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	28	Sulawesi Tengah	18
10	Kepulauan Riau	8	29	Sulawesi Utara	12
11	Banten	38	30	Sulawesi Selatan Barat	2
12	Jawa Barat	88	31	Maluku	19
13	DKI Jakarta	203	32	Maluku Utara	0
14	Jawa Tengah	40	33	Papua	9
15	Jawa Timur	65	34	Papua Barat	2
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	18	35	Tanpa Alamat	25
17	Bali	17			
18	Nusa Tenggara Barat	10			
19	Nusa Tenggara Timur	14			

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	445
2	Subkomisi mediasi	77
3	Tim 65	19
4	Tim KZ	2
5	File	327
Jumlah		870

3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
		406
1	Langsung	451
2	Tembusan	13
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	870
Jumlah		

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
		73
1	Datang langsung	723
2	Pos	21
3	Fax	36
4	Email	5
5	Audiensi	12
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	
Jumlah		870

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
		23
1	Hak untuk hidup	1
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	10
3	Hak mengembangkan diri	322
4	Hak memperoleh keadilan	24
5	Hak atas kebebasan pribadi	70
6	Hak atas rasa aman	318
7	Hak atas kesejahteraan	13
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	7
9	Hak perempuan	2
10	Hak anak	5
1	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	75
12	Non HAM	
Jumlah		870

5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
	7
Mempertahankan hidup	16
Lingkungan hidup	
Jumlah	23
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
	1
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1
Jumlah	
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
	5
Hak atas pendidikan	
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	5
Jumlah	10

IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	245
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	24
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	41
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	11
Jumlah	321
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	2
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	12
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	0
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	2
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	5
Jumlah	24
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	15
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	15
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	15
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	21

Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	5
Jumlah	71
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	21
Hak atas kepemilikan tanah	102
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	81
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	41
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	52
Hak atas kesehatan	18
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	2
Jumlah	317
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	0
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	0
Jumlah	0
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	5
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	1
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	7
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	3
Hak atas kesetaraan dengan suami	4
Jumlah	20
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1

Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	1
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	2
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	3
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1
Jumlah	4
Tidak ada turunan hak	Jumlah berkas
	77
Non Ham	

6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
		440
1	Individu - Orang seorang	
2	Individu - Anak	8
3	Individu - Perempuan	26
4	Individu - Buruh migran	2
5	Individu - Pekerja / profesi	27
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	1
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	2
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	9
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	181

15	Kelompok - Anak-anak	2
16	Kelompok - Perempuan	1
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	59
19	Kelompok - Masyarakat adat	21
20	Kelompok - Ras dan etnis	1
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	5
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	1
23	Kelompok - LGBT	0
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	6
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	5
28	Warga negara asing	3
29	Korporasi	6
30	Lembaga Pendidikan	3
31	Polri	1
32	Lembaga Peradilan	0
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	59

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	64
2	Pemerintah daerah	110
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non-kementerian)	16
5	Lembaga peradilan	44
6	Kepolisian	284
7	TNI	25

8	Kejaksaan	28
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	6
10	Pemerintah negara lain	3
11	Korporasi	135
12	BUMN / BUMD	43
13	Lembaga pelayanan kesehatan	2
14	Lembaga pendidikan	13
15	Organisasi	6
16	Individu Orang seorang	14
17	Individu Pekerja / profesi	3
18	Kelompok Masyarakat	7
19	Kelompok Masyarakat adat	1
20	Individu Perempuan	0
21	Kelompok Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	66

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999¹, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999² dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan regular dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

¹Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

²Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
55	127	13	195

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.